

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi terbentuk berdasarkan kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang tidak menyalurkan aspirasi nya.

Mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri,

merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah yang menjadi pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak baik. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan analisis rasio laporan keuangan. Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Batam.

Pentingnya dalam menganalisis suatu laporan keuangan secara menyeluruh untuk menilai perbandingan saldo-saldo yang dipandang berkaitan, yang dapat mencerminkan posisi keuangan suatu instansi serta kinerja keuangan tersebut seperti bagaimana likuiditas keuangan, kemampuan instansi dalam melunasi utang serta kemampuan untuk menghasilkan laba dan hal lainnya, baik itu merupakan suatu kemajuan ataupun suatu kemunduran. Perbandingan inilah yang lebih dikenal dengan istilah rasio. Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan data dari tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan.

Disamping itu, bukan rahasia lagi bahwa suatu instansi di Negara berkembang menggunakan utang sebagai penggerak kinerja keuangannya. Namun

penggunaan utang ini juga dapat menjadi bumerang bagi instansi itu sendiri karena disatu sisi penggunaan utang ini dapat memacu kinerja perusahaan, tetapi disisi lain hal ini dapat menjerumuskan suatu instansi dalam belenggu lilitan utang atau dalam mengalami kondisi kesulitan finansial (*financial distress*) dan bahkan juga dapat mengalami kebangkrutan jika utang tersebut tidak dikelola dengan benar. Dari beberapa analisis rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan diantaranya adalah analisis rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Analisis rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya, sedangkan rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. (Mamduh, 2009).

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang berkedudukan sebagai koordinator pengelolaan perhubungan baik darat, laut maupun udara di Prrovinsi Kepulauan Riau. Secara garis besar, fungsi strategis yang dijalankan adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Perhubungan. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*realible*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan (Ropa, 2016)

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya *desentralisasi* sistem pemerintahan pada Kota Batam, karena itu Pemerintah Kota Batam sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kota Batam berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya

pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Batam, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Batam adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis kinerja keuangan pada dinas perhubungan berdasarkan laporan keuangan tahun 2013-2017.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah
3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan

dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

4. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio dilakukan untuk melihat adakah kecenderungan yang terjadi dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini agar dapat lebih fokus dalam melakukan penelitiannya. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah tujuan serta dapat diketahui sejauh mana penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Laporan keuangan APBD yang diamati adalah Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Batam di Provinsi Kepri tahun 2013-2017.
2. Kinerja keuangan pemerintah dalam penelitian ini hanya diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.
3. Penelitian ini dilakukan terhadap Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2013 - 2017

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Aktivitas atau keserasian ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Aktivitas atau keserasian.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik bagi Dinas Perhubungan Kota Batam dalam proses menilai kinerja pada aspek keuangan.
2. Sebagai evaluasi dan bentuk perbandingan dengan sistem yang selama ini dijalankan pemerintahan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada terutama ilmu analisis kinerja keuangan suatu instansi.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Belajar untuk meneliti, menguji, dan/atau mengobservasi fenomena dan permasalahan yang terjadi.
2. Untuk tambahan informasi dan wawasan bagi penulis.
3. Secara akademis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur di akuntansi dan juga dapat memperkaya pengembangan ilmu dalam bidang keuangan.
4. Menjadi sarana perwujudan latihan akademik dan pendalaman ilmu sekaligus pemahaman penulis, sebagai hasil proses pembelajaran penulis hingga saat ini, serta tentunya menjadi stimulus bagi penulis untuk lebih banyak belajar.

5. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin memperdalam pengetahuan dan ingin melakukan evaluasi lebih lanjut.